



Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Khairur Rizki | Muhammad Sood | Valencia Husni

INSTITUTION/ AFFILIATION

Program Studi Hubungan
Internasional, Universitas Mataram,
Mataram, Indonesia

CORRESPONDENCE

*Khairur, Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Nusa Tenggara Barat, 83125, Indonesia.
Email: krizki@unram.ac.id

ABSTRACT

The United Nations (UN) adopted the Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015 to eliminate poverty, bring prosperity, and save the planet by 2030. As a UN member, Indonesia is also responsible for achieving SDGs. Indonesia's commitment is shown by appointing the National Development Planning Agency (BAPPENAS) as the central coordinator and presenting a Presidential Regulation (Perpres) to encourage every region to be involved in implementing the SDGs. Accordingly, the Government of Nusa Tenggara Barat (NTB) issued the Regional Action Plan (RAD) as a reference for pursuing sustainable development in NTB. This study seeks to reflect on SDGs' implementation in the NTB Regional Action Plan using the human security approach. This approach explains that providing a sense of security for humans is the ideal condition, including sustainable development. This study employs qualitative descriptive research in order to analyze NTB's RAD from 2019 to 2023. The findings of this research reflect the suitability of the NTB Provincial Action Plan with the application of the human security concept in its implementation.



KEYWORDS

Human Security; Nusa Tenggara Barat; Regional Action Plan; Sustainable Development Goals

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global sejak tahun 2015 (United Nations, 2015). Agenda ini diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dan dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurut PBB, agenda SDGs adalah untuk mentransformasi dunia menjadi lebih inklusif dan setara. Inklusifitas dan kesetaraan ini dicapai melalui prinsip universal dan terintegrasi untuk menjamin bahwa tidak ada siapaun yang boleh tertinggal (*no one left behind*) (UNCDP, 2018). Prinsip - prinsip tersebut kemudian menjadi fondasi dasar agenda pembangunan berkelanjutan dan melibatkan banyak aktor serta aksi. Perkembangan aksi dan keterlibatan aktor dalam agenda PBB menjadikan topik ini sebagai *cetak biru* atau *kiblat* untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan dunia. Oleh karena itu, agenda SDGs harus dilaksanakan secara merata diseluruh negara.

Agenda SDGs, yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, mengindikasikan bahwa untuk mencapai semua tujuan pembangunan tersebut harus melibatkan banyak aktor. Bukan saja negara sebagai entitas yang paling

memiliki otoritas dan kekuasaan, tetapi juga aktor non-negara perlu dilibatkan agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana hingga akar rumput (Queralt & Sala, 2018). Jika kembali berkaca pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional maka beberapa aktor dapat mengambil peran dalam pelaksanaan SDGs, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai semua target SDGs maka pemerintah daerah juga harus melakukan aksi, termasuk di Indonesia (Yusuf, 2017). Indonesia telah berkomitmen untuk mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh PBB tersebut. Komitmen yang ditunjukkan Indonesia adalah dengan menyesuaikan agenda SDGs dengan agenda pembangunan Presiden Joko Widodo (Kementerian PPN, 2020).

Penyesuaian agenda pembangunan tersebut bertujuan agar Indonesia memiliki pedoman yang tepat dalam melaksanakan pembangunan mengingat banyaknya investasi yang masuk di Indonesia. Penyesuaian agenda tersebut juga melibatkan berbagai macam stakeholder seperti pemerintah, filantropis, masyarakat bisnis, masyarakat sipil, media, akademisi, dan para ahli. Keterlibatan stakeholder tersebut

diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menginstruksikan setiap provinsi di Indonesia untuk turut terlibat. Salah satu upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah setiap provinsi harus merancang Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas (Kementerian PPN, 2020).

Dalam tulisan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi objek penelitian. Pemilihan provinsi NTB adalah karena provinsi ini masuk menjadi salah satu proyeksi pembangunan utama pemerintah Indonesia. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan menghindari munculnya ancaman terhadap masyarakat maka perlu dipastikan rasa aman kepada masyarakat NTB. Dalam usaha untuk mencapai SDGs, pemerintah NTB telah menghasilkan RAD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dalam peraturan ini, setiap Gubernur di Indonesia harus menyusun RAD SDGs bersama Bupati/Walikota di wilayah masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Selain itu Gubernur juga menyampaikan laporan pencapaian setiap tahun atas pelaksanaan sasaran SDGs Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. RAD provinsi direncanakan pelaksanaannya selama 4 tahun (2019-2023). Payung hukum RAD NTB terdapat dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB No. 36 Tahun 2018. Pergub tersebut menjelaskan tentang RAD Percepatan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2019-2023 di NTB dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Prioritas RAD NTB ditekankan pada kemiskinan dan lingkungan hidup, termasuk isu sanitasi (Pergub Nomor 54 Tahun 2019). Dari latar belakang ini, maka menarik untuk melihat upaya provinsi NTB dalam melaksanakan RAD pembangunan berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk merefleksikan Rencana Aksi Daerah Provinsi NTB terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dengan menggunakan pendekatan *human security*, dimana pendekatan ini menjelaskan bahwa memberikan rasa aman bagi manusia adalah kondisi yang ideal, termasuk dalam hal pembangunan. Penulis menggunakan pendekatan Keamanan Manusia (*Human Security*) untuk menganalisa upaya dan rencana tersebut serta menjadi refleksi untuk melihat pembangunan berkelanjutan di

NTB. Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian, “bagaimana refleksi kesesuaian pelaksanaan RAD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui konsep *Human Security*?”

TINJAUAN LITERATUR

Pendekatan keamanan manusia (*human security*) pertama kali disebutkan melalui Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) tahun 1994. Laporan ini menyoroti dua komponen utama dalam konsep keamanan manusia, yaitu kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan. Laporan ini juga menjelaskan perubahan paradigma keamanan manusia. Sebelumnya tema keamanan diidentikkan dengan keamanan yang berhubungan dengan negara (aman dari ancaman negara lain), laporan ini mencoba mengglobalisasikan definisi keamanan dimana keamanan pada era sekarang adalah rasa aman untuk manusia itu sendiri. Konsep keamanan manusia juga menjelaskan bahwa rasa aman yang diberikan kepada manusia adalah berupa kebebasan dari ancaman berbahaya seperti kelaparan, penyakit dan penindasan. Selain itu, konsep ini juga menjamin pemberian perlindungan dari ancaman tiba-tiba dalam pola kehidupan sehari-hari.

Konsep *human security* mengkategorikan rasa aman kepada manusia menjadi tujuh bagian, yaitu keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan makanan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*),

keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan personal (*personal security*), keamanan komunitas (*community security*), dan keamanan politik (*political security*) (United Nations, 2009). Keamanan manusia juga dapat menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan. Beberapa nilai yang dapat diadopsi dari Keamanan Manusia dapat dilihat dari prinsip konsep ini. Prinsip keamanan manusia adalah Berpusat pada manusia, Multisektor, Komprehensif, Konteks yang spesifik, dan Berorientasi pada pencegahan (United Nations, 2009).

Thakur dan Newman, dikutip dalam Hadiwinata (2017), mendefinisikan keamanan manusia sebagai perlindungan orang dari bahaya kritis yang mengancam jiwa, terlepas dari apakah ancaman itu berakar pada kegiatan antropogenik atau peristiwa alam, apakah mereka berada di dalam atau di luar negara, dan apakah ancaman itu langsung dari struktur. Pemahaman semacam ini diadopsi oleh PBB sebagaimana dirangkum dalam pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan bahwa masalah yang dihadapi dalam pembangunan dunia adalah mengintegrasikan pembangunan, keamanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi satu dalam bentuk perlindungan terhadap tiga macam kebebasan, yakni: bebas dari rasa takut, bebas dari rasa ingin, dan bebas untuk menjaga martabat manusia (Hadiwinata, 2017).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada deskripsi Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi NTB dalam kaitannya dengan implementasi SDGs. Sedangkan model penelitian yang digunakan bersifat deduktif karena penulis menggunakan konsep keamanan manusia sebagai perangkat analisis untuk memandu penulis dalam mengkaji fenomena (Levy, 2009). Dalam *design* penelitian, penulis melakukan *pre-research* dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap studi kasus terkait pembangunan berkelanjutan melalui konsep keamanan manusia. Penulis memperoleh data primer berupa salinan Rencana Aksi daerah Provinsi NTB dari kantor Bappeda. Penulis juga melakukan observasi terkait pelaksanaan RAD tersebut antara tahun 2020 dan 2022, terhitung sejak di keluarkannya Pergub NTB tahun 2019.

Content analysis dilakukan penulis dalam bentuk studi pustaka, telaah dokumen, dan media daring untuk mendapatkan data sekunder. Studi pustaka dilakukan menggunakan beberapa buku, jurnal, situs website, laporan, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas topik serupa dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam artikel ini dibagi dalam tiga tahapan berdasarkan model yang ditawarkan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya SDGs dan keterkaitannya dengan *human security*

Sustainable Development merupakan sebuah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan untuk semua orang. Pembahasan tentang pembangunan berkembang pesat pasca perang dingin. Perkembangan ini disebabkan orientasi dunia yang bertujuan untuk mencegah perdamaian serta memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Pembangunan sendiri sebenarnya merupakan proses multidimensi, terutama dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selama ini, kecenderungan dari proses pembangunan merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang eksploitatif tanpa memperhatikan kesinambungan antar dimensi (Medcof & Song, 2013). Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan kehidupan masyarakat. Pembangunan Berkelanjutan dianggap sebagai salah satu opsi utama untuk menciptakan pembangunan yang dapat bertahan untuk jangka panjang dan meminimalisir berbagai dampak negatif dari pembangunan.

Menurut Jeffrey Sachs, Direktur *United Nations - Sustainable Development Solutions Network* (UN-SDSN), pondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dan politik (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Misalnya pada

dimensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata, melalui penciptaan lapangan kerja dengan upah layak. Hal ini dikarenakan disparitas pendapatan yang tinggi dapat menciptakan konflik sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam dimensi ekonomi juga, pertumbuhan dan pembangunan harus ramah lingkungan, misalnya dengan tidak melakukan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Dalam dimensi politik, kehadiran pemerintah juga diperlukan agar dapat menjamin tujuan pembangunan tercapai. Peran pemerintah dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dengan menghadirkan regulasi, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan infrastruktur.

Melalui PBB, negara-negara di dunia menyepakati konsep pembangunan berkelanjutan. Agenda pertama yang disetujui adalah *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000 dengan 8 tujuan pembangunan global. Akan tetapi, agenda pembangunan MDG resmi berakhir tahun 2015 dan dianggap masih belum mencapai tujuan pembangun yang berkelanjutan sehingga mendorong untuk menghadirkan agenda lanjutan. Sebagai gantinya, dibentuklah satu agenda pembangunan global baru untuk diadopsi. Agenda baru ini dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Diouf, 2019). Kehadiran SDG disepakati oleh 193 negara termasuk

Indonesia. MDGs dan SDGs memiliki beberapa perbedaan.

Perbedaan pertama adalah terletak dari aktor – aktor yang merumuskan kedua program ini. MDGs dirumuskan oleh *Economic Co-operation and Development* (OECD) sedangkan SDGs dirumuskan oleh pemangku kepentingan yang lebih luas dan melibatkan semua kalangan sehingga SDGs dianggap memiliki prinsip-prinsip HAM, inklusivitas, dan antidiskriminasi. Perbedaan kedua adalah terdapat pada fokus yang dimiliki SDGs. SDGs tidak hanya berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan sementara tetapi kebutuhan masa yang akan datang dan berkelanjutan. Perbedaan ketiga adalah SDGs hadir untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Perbedaan keempat terdapat pada rancangan SDGs yang hadir untuk mendorong perdamaian agar terwujud masyarakat adil dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan. Sedangkan perbedaan terakhir adalah SDGs sangat mengutamakan kerjasama seluruh pemangku kepentingan sehingga semua kalangan saling terintegrasi (SMERU Research Institute, 2017).

SDGs resmi hadir pada tahun 2015 untuk meneruskan agenda sebelumnya (MDGs). Kehadiran SDGs diawali ketika PBB menyelenggarakan konferensi internasional yang membahas pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro, Brazil pada Juni 2012 (Filho, 2015). Konferensi ini dikenal dengan nama Konferensi Rio+20. Salah satu hasil

terpenting dari konferensi tersebut adalah hadirnya sebuah dokumen yang diberi nama *the future we want* (Stevens & Kanie, 2016). Dokumen inilah yang kemudian menjadi acuan hadirnya SDGs. Inti yang paling penting dari dokumen tersebut adalah diperlukannya agenda pembangunan berkelanjutan baru untuk melanjutkan MDGs, namun dengan visi

yang lebih luas, holistik dan bersifat universal. Agenda dari SDGs menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh dan ditargetkan tercapai pada tahun 2030. SDGs memiliki 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti yang di ilustrasikan pada gambar 1.



Gambar 1. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Sumber: United Nations (n.d)

Di sisi lain, kehadiran SDGs juga menghadirkan semangat positif. Agenda yang sangat ambisius ini justru dianggap dapat mengajak dan mengkolaborasi semua pemangku kepentingan untuk ikut secara bersama mencapai semua tujuan dari SDGs dan menyelesaikan tantangan pembangunan seperti ketimpangan dan kerusakan (Panuluh & Fitri, 2016). Perbedaan prinsip yang dimiliki SDGs juga dianggap dapat memberikan harapan agar dunia dapat menjadi tempat

yang baik untuk ditinggali di masa depan. Salah satu prinsip penting lainnya adalah fokus pembangunan SDGs tidak hanya di negara berkembang dan tertinggal melainkan juga di negara maju. Inilah mengapa SDGs disebut sebagai agenda yang bersifat universal.

Dari pendekatan *human security* (keamanan manusia), PBB telah menyatakan bahwa SDGs telah sejalan dengan prinsip *human security*. Bahkan PBB juga menyatakan bahwa aplikasi

keamanan manusia dapat meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan – tujuan SDGs. Keamanan Manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep dan bagian dari disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Konsep *human security* dapat mendekati masyarakat sehingga mengetahui kebutuhan dasar masyarakat dan menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan agenda SDGs. *Human security* juga hadir untuk menghilangkan eksklusifitas sosial dan ketidakadilan dalam pembangunan yang tentunya sangat mirip dengan prinsip dari SDGs.

Human Security, berdasarkan visinya berusaha untuk mencapai kebebasan dari ketakutan, keinginan, dan penghinaan, serta dapat membantu mengatasi tantangan yang berasal dari konflik/perang, marginalisasi, dan kemiskinan yang parah. Ini menekankan hubungan segitiga antara perdamaian dan keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia, menyoroti hubungan yang sangat diperlukan. Artinya strategi pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan akar permasalahan dan solusi perbaikan untuk membendung kekerasan dan bentuk-bentuk kerapuhan lainnya, dan menghentikan dampaknya terhadap pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep keamanan manusia memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dunia dengan menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan.

SDGs memiliki tiga pilar utama (Dumpe & Guevara, 2020; Zu, 2022). Pilar pertama adalah orientasi SDGs berada pada 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership*). Pilar kedua adalah *no one is left behind*. Pilar kedua inilah yang menjadi acuan banyak negara termasuk Indonesia dimana SDGs harus menjadi agenda bersama dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Turunan pilar ini membawa Indonesia untuk aktif melaksanakan pembangunan berkelanjutan secara nasional dengan melibatkan pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Berangkat dari pilar kedua inilah agenda SDGs diadopsi oleh Indonesia agar berperan aktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Sedangkan pilar ketiga adalah sasaran pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik.

Implementasi SDGs di Indonesia

Keseriusan Indonesia terhadap SDGs kemudian ditandai dengan menciptakan rancangan legalitas untuk pelaksanaannya. Rancangan ini diawali ketika Koalisi Masyarakat Sipil (CSO) Indonesia berkesempatan bertemu dengan presiden Joko Widodo dan menuntut tiga hal, yaitu menuntut pemerintah menyusun payung hukum pelaksanaan SDGs, menuntut pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) bagi pelaksanaan SDGs, dan menuntut pemerintah untuk membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan SDGs. Aksi tersebut tercemin dalam pendekatan

Human Security dimana proses sebuah kebijakan untuk menjamin keamanan masyarakat harus melewati tahap *bottom-up*. Tuntutan ini kemudian direspon dengan didadakannya sidang kabinet yang menghasilkan beberapa keputusan seperti instruksi yang diberikan Presiden kepada para Menteri untuk segera menghadirkan kerangka dokumen mengenai atruan bagi pelaksanaan SDGs dalam bentuk Peraturan Presiden. Amanat ini dilimpahkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Proses penyusunan kerangka legal untuk SDGs ini telah dimulai sejak awal tahun 2016 dengan membuka partisipasi masyarakat melalui diskusi dan konsultasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bersamaan dalam proses ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs pun telah memberikan usulan Perpres. Perpres yang dihasilkan adalah Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut kemudian mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 5 tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayah masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya serta menyampaikan laporan pencapaian setiap tahun atas pelaksanaan SDGs di daerah. Dari sini dapat disimpulkan peran pemerintah daerah secara umum adalah memperkuat komunikasi, sosialisasi dan advokasi; mendorong pengembangan dan

peningkatan data; melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SDGs; dan memperkuat kerjasama dengan *stakeholders* terkait lainnya seperti CSO, akademisi, filantropi dan bisnis (Kementerian PPN, 2020).

Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Berangkat dari kerangka nasional tersebut, pemerintah daerah NTB kemudian mengambil sikap untuk turut berperan dalam melaksanakan SDGs. Hal ini diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2019-2023. Melalui Pergub tersebut pemerintah daerah NTB menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyusun RAD. Penyusunan RAD tersebut melalui proses kombinasi metode *bottom-up* dan *top-down* dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Salah satu *stakeholder* yang terlibat adalah elemen masyarakat seperti lembaga masyarakat dan kelompok masyarakat (Bappeda NTB, n.d).

Terlibatnya elemen masyarakat dalam perancangan RAD berguna untuk menemukan masalah pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika kembali melihat pendekatan *human security*, proses awal pembentukan RAD tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai dari pendekatan itu dimana sebuah

keperintahan harus menggunakan metode *bottom-up* dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dilakukan agar dapat menyentuh permasalahan yang benar-benar dialami masyarakat sekaligus untuk menjamin rasa aman. Keterlibatan elemen masyarakat dalam proses pembuatan RAD telah sejalan dengan pemaknaan konsep *human security*.

RAD yang dihasilkan menjadi pedoman pelaksanaan SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk jangka waktu

2019 – 2023. RAD ini sekaligus melakukan penyesuaian dengan masalah pembangunan yang dialami di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pada bagian awal RAD ini juga menjelaskan penyelarasan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tabel berikut adalah rangkuman analisa keterkaitan RPJMD Provinsi NTB dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Tabel. 1 Keterkaitan RPJMD Provinsi NTB dan SDGs

RPJMD PROVINSI NTB 2018-2023	SDGs
8 MISI	TUJUAN
1. Mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender yang proporsional	G 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G 5 Kesetaraan Gender
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi	G 1 Tanpa Kemiskinan G 2 Tanpa Kelaparan G 10 Berkurangnya Kesenjangan G 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan G 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3. Mempercepat peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif	G 4 Pendidikan Berkualitas G 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G 17 Kemitraan

<p>4. Mempercepat transformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani</p>	<p>G 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan G 14 Ekosistem Laut G 15 Ekosistem Daratan</p>
<p>5. Mempercepat pengelolaan sumberdaya dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan</p>	<p>G 7 Energi Bersih dan Terjangkau G 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan G 14 Ekosistem Laut G 15 Ekosistem Daratan G 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur</p>
<p>6. Mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sektor pariwisata, industrial sektor unggulan, serta kawasan strategis</p>	<p>G 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan G 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</p>
<p>7. Menegakkan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan</p>	<p>G 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G 13 Penanganan Perubahan Iklim</p>
<p>8. Mempercepat transformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani</p>	<p>G 17 Kemitraan G 5 Kesenjangan Gender</p>

Sumber: diolah oleh penulis

Refleksi konsep *Human Security* Terhadap RAD SDGs di Provinsi NTB

RAD Provinsi menjelaskan masing-masing strategi yang dilaksanakan untuk setiap tujuan di SDGs. RAD telah mengikuti salah satu prinsip awal SDGs

dimana setiap negara/dearah dibolehkan untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Berikut adalah penjabaran aksi daerah untuk 17 tujuan SDGs di Provinsi NTB.

Aksi Daerah untuk Tujuan 1

Pada Tujuan pertama, RAD provinsi NTB lebih berfokus pada penyajian data statistik angka kemiskinan. Selain itu pada RAD juga hanya menyajikan data terkait akses terhadap pendidikan yang dianggap sebagai salah satu faktor terbesar penyumbang angka kemiskinan. Belum dijelaskan aksi khusus yang akan dilaksanakan untuk mengurangi kemiskinan sekaligus memberikan akses pendidikan terhadap masyarakat di NTB. Upaya nyata yang dijelaskan dalam RAD adalah pengendalian harga pokok agar dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup tetapi strategi ini belum secara langsung dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan (Suryadi, 2019). Persoalan kemiskinan menjadi bagian dari konsep keamanan manusia terutama untuk dimensi ekonomi (*Economic Security*). Melihat strategi yang dijelaskan dalam RAD, pelaksanaannya masih belum sejalan dengan *human security*.

Selain itu upaya lain yang dijelaskan pada Tujuan 1 adalah pemberian jaminan kesehatan yang ternyata tidak memiliki relevansi langsung terhadap isu kemiskinan. Meski demikian strategi pemberian jaminan kesehatan yang dilakukan Provinsi NTB cukup positif sehingga strategi ini selaras untuk memberikan rasa aman dalam dimensi kesehatan terhadap masyarakat (*Health Security*) (FA, 2019).

Aksi Daerah untuk Tujuan 2

Pada Tujuan kedua yaitu menghilangkan kelaparan, provinsi NTB memiliki strategi yang sangat baik. Beberapa aksi telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Aksi yang dilakukan adalah menjamin ketersediaan pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Aksi berikutnya adalah jaminan kebutuhan gizi dan menginisiasi program Generasi Emas NTB (Bappeda NTB, n.d.) Aksi tersebut merupakan strategi yang sejauh ini berhasil meningkatkan angka pertumbuhan masyarakat terutama anak – anak. Aksi berikutnya yang dilakukan adalah akselerasi peningkatan produktivitas pertanian. Aksi cukup efektif mengingat NTB merupakan provinsi penghasil produk pertanian terbaik dan aksi ini juga sejalan dengan RPJMD. Selanjutnya untuk meningkatkan hasil pertanian pemerintah NTB juga melaksanakan pembangunan sistem pertanian tangguh agar dapat menjamin hasil pertanian berkualitas tinggi sehingga harga jualnya meningkat. Aksi terakhir untuk mewujudkan Tujuan kedua adalah pelestarian sumber daya ternak. Aksi ini dapat dikatakan berhasil karena hasil ternak NTB meningkat setiap tahunnya.

Aksi – aksi yang dilakukan untuk mencapai Tujuan kedua ini dapat dikatakan berhasil sekaligus mencakup beberapa dimensi dalam *human security* seperti *economic security*, *food security*, dan *health security*. Pelaksanaan aksinya juga melibatkan masyarakat sehingga

kolaborasi lintas kelompok juga merupakan prinsip yang sama dengan *human security*. Aksi – aksi ini sudah selayaknya untuk dilanjutkan dan ditingkatkan.

Aksi Daerah untuk Tujuan 3

Tujuan ketiga adalah menjamin kesehatan dan kesejahteraan semua usia. Pada tujuan ketiga ini pemerintah NTB memiliki beberapa Aksi. Yang pertama adalah mengurangi angka kematian ibu melalui pengawasan terhadap ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan K4 (kunjungan ibu hamil ke tenaga kesehatan yang dilakukan paling sedikit 4 kali selama hamil) serta memastikan persalinan ditangani oleh tenaga medis profesional. Pemerintah provinsi NTB juga terus mendorong kehadiran lulusan bidan agar dapat terlibat dalam aksi pertama. Aksi kedua adalah mengakhiri kematian bayi dan balita melalui peningkatan fasilitas kesehatan terutama di daerah yang masih belum memiliki fasilitas tersebut dan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan. Dua aksi tersebut sejauh ini masih menjadi upaya utama untuk mengurangi kematian bayi dan balita. Aksi berikutnya merupakan penyesuaian dengan kondisi daerah yaitu mengakhiri Epidemik penyakit menular. Salah satu epidemik tertinggi di NTB adalah penularan HIV/AIDS (Pemerintah Provinsi NTB, 2021) Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu karena NTB sebagai daerah destinasi wisata dan banyaknya warga NTB yang menjadi Pekerja Migran Indonesia sehingga memiliki mobilitas

yang tinggi. Provinsi NTB memberikan fokus khusus untuk menurunkan angka penularan HIV/AIDS di NTB. Aksi yang dilakukan adalah dengan penambahan dan peningkatan konseling dan tes HIV secara sukarela (KTS). KTS sejauh ini masih dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk merespon HIV/AIDS. Selanjutnya pemerintah NTB juga melakukan pengendalian HIV/AIDS melalui pengamatan terhadap hasil penapisan darah. Selain HIV/AIDS, TBC atau Tuberkulosis juga disebut sebagai salah satu endemik di NTB namun pada RAD tidak dijelaskan aksi untuk merespon endemi tersebut.

Aksi selanjutnya yang dilakukan untuk tujuan ketiga adalah mengakhiri kematian akibat penyakit tidak menular (PTM). Hipertensi, obesitas dan pemeriksaan kanker leher rahim dan payudara adalah bentuk PTM yang terjadi di NTB. Pemerintah daerah kemudian melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM di semua tingkatan pelayanan kesehatan, penanggulangan faktor resiko PTM dan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko PTM berbasis masyarakat. Salah satu upaya paling nyata adalah melakukan pengukuran tekanan darah yang dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan. Aksi ini juga masih berhubungan dengan aksi selanjutnya yaitu mencapai cakupan kesehatan universal melalui peningkatan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Dua aksi terakhir yang dilakukan pemerintah NTB untuk mencapai target Tujuan kedua adalah meningkatkan

layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, obat, dan vaksin.

Jika dilihat dari pendekatan *human security*, aksi yang dilakukan oleh pemerintah NTB dalam mencapai target Tujuan ketiga dapat dikatakan sangat baik dan memiliki ciri *people centered*. Keterlibatan masyarakat dalam beberapa aksi tersebut juga dapat dikatakan mampu memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Beberapa dimensi *human security* yang dilaksanakan meliputi *health security*. Sebagai turunan dari *human security*, konsep *Health Security* memiliki tujuan melindungi manusia dari berbagai macam penyakit dan gaya hidup tidak sehat.

Aksi Daerah untuk Tujuan 4

Tujuan keempat dalam SDGs adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terpenting dalam pembangunan sekaligus dalam memberikan rasa aman secara struktural kepada manusia. Untuk mencapai keberhasilan dalam peningkatan kualitas pendidikan daerah, pemerintah NTB mengambil sikap dengan perluasan akses pendidikan untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif (Wijana & Suhardi, 2018) Aksi ini juga sekaligus untuk menurunkan disparitas pendidikan berdasarkan gender. Dua aksi tersebut juga sekaligus untuk membantu keberhasilan RPJMD dan RPJMN. Tentunya aksi tersebut juga diikuti

dengan peningkatan kualitas guru, dosen, dan tenaga kependidikan.

Jika dilihat dari *human security* yang dijelaskan PBB, isu pendidikan sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung berhubungan dengan kemanan manusia kecuali jika dihubungkan dengan dimensi Keamanan Ekonomi. Namun jika berkaca pada penjelasan *human security*, inklusifitas merupakan hal yang penting untuk memberikan rasa aman kepada manusia. Selain inklusifitas, persoalan pendidikan juga masih menjadi masalah struktural sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah NTB dalam mencapai Tujuan keempat sangat beririsan dengan *human security*.

Aksi Daerah untuk Tujuan 5

Tujuan kelima SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Masalah gender masih menjadi momok terutama untuk negara berkembang. Dalam aksinya pemerintah NTB berusaha untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Angka kekerasan terhadap perempuan di NTB masih terbilang tinggi (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021). Sehingga penghapusan kekerasan tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di NTB. Selain itu pemerintah NTB juga melakukan pendidikan seksual dan keluarga berencana untuk menurunkan jumlah pernikahan dini. Beberapa pakar menyebutkan praktik pernikahan dini

sudah berbudaya di NTB. Beberapa aksi lain yang dilakukan oleh pemerintah NTB untuk mendukung tujuan kelima adalah penjaminan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi, peningkatan penggunaan teknologi, kebijakan, perundang – undangan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.

Sebagian aksi yang dilaksanakan oleh pemerintah NTB cukup mewakili pemberian rasa aman terhadap manusia khususnya perempuan dalam dimensi *health security, personal security, dan community security*. Namun beberapa aksi masih harus diselaraskan dengan *human security*. Peningkatan penggunaan teknologi masih belum memiliki korelasi dengan pemberian rasa aman kepada manusia khususnya perempuan. Selain itu aksi terakhir yang berhubungan dengan kebijakan masih sulit untuk dilaksanakan karena proses pembuatan kebijakan (terutama kebijakan tentang gender) di Indonesia belum benar – benar melalui proses *bottom – up* sehingga hal ini masih menjadi tantangan untuk pemerintah daerah (Sofiani, 2019).

Aksi Daerah untuk Tujuan 6

Pada tujuan keenam, RAD provinsi NTB turut menjelaskan aksi untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Aksi yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah penjaminan akses air minum layak dan terjangkau, penjaminan penyediaan sanitasi, melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM), dan meningkatkan kualitas air sungai dan danau sebagai air baku. Tentunya semua pihak sadar bahwa air merupakan kebutuhan paling vital untuk keberlangsungan hidup manusia. Maka sudah sewajarnya pemerintah NTB melaksanakan aksi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan air masyarakat NTB. Menarik untuk dilihat terkait aksi STBM. Aksi ini sangat mencerminkan *human security* dimana keterlibatan masyarakat untuk memiliki perilaku higienis. Perilaku higienis dapat menjaga kebersihan lingkungan sehingga ketersediaan air (dari alam) terjamin.

Aksi Daerah untuk Tujuan 7

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan ketujuh adalah menjamin akses energi. Aksi ini dilakukan agar kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi. Selain memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah NTB juga melakukan pengembangan energi terbarukan. Pemenuhan energi merupakan satu isu baru yang belum secara langsung dijelaskan dalam konsep *human security*. Keamanan energi dapat menjadi terobosan baru dalam pembahasan *human security* terutama di era digital saat ini.

Aksi Daerah untuk Tujuan 8

Dalam pemenuhan tujuan kedelapan, pemerintah NTB mengembangkan ekonomi mikro, pemberdayaan UMK, dan meningkatkan industri pariwisata. Aksi-aksi tersebut sudah sangat disesuaikan dengan kondisi daerah. Isu ekonomi memang sudah melekat dengan

pendekatan *human security* sehingga apa yang dilakukan pemerintah NTB sangat berhubungan dengan mengamankan kondisi ekonomi masyarakat. Aksi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Aksi Daerah untuk Tujuan 9

Infrastruktur merupakan hal yang juga menjadi bagian dari tujuan ke 9 SDGs. Pembangunan infrastruktur juga harus diikuti dengan beragam pengembangan industri dan inovasi. Karena itu, pemerintah NTB kemudian melaksanakan pembangunan infrastruktur terutama untuk menyokong jalur distribusi dan akses seperti Bandar udara dan pelabuhan. Pembahasan infrastruktur tidak secara eksplisit menjadi bagian dari penjelasan mengenai *human security*. Tetapi jika melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan jalur akses dan distribusi tentunya akan memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Aksi Daerah untuk Tujuan 10

Tujuan kesepuluh SDGs adalah menghilangkan kesenjangan. Kesenjangan selalu menjadi masalah sosial dan tantangan pembangunan terutama di negara berkembang. Meskipun tidak ada SDGs, pemerintah NTB pasti akan tetap berusaha untuk menghilangkan kesenjangan di NTB. Jika dilihat dari RAD, pemerintah NTB memiliki langkah – langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah kesenjangan. Beberapa program

yang dilakukan adalah Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Jamban Keluarga, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (Kube), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pengelolaan sampah (Bank sampah) dan Cakupan Air bersih. Program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di NTB. Jika dilihat dari kacamata *human security*, program yang dilaksanakan oleh pemerintah NTB sejalan dengan tipe kemanan manusia terutama dalam segi kesehatan, ekonomi, dan komunitas.

Aksi daerah untuk Tujuan 11

Tujuan SGD selanjutnya adalah menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Terdapat dua aksi yang dilakukan oleh pemerintah NTB, yang pertama adalah menghadirkan pemukiman berkelanjutan. Namun untuk aksi ini belum dijelaskan strategi konkrit sehingga tidak memiliki nilai yang bisa direfleksikan dengan konsep Kemanan manusia. Sedangkan aksi kedua adalah menghadirkan tempat tinggal yang ramah bencana. Daerah NTB terutama Lombok adalah daerah yang rentan dengan bencana. Program ini sangat baik sekali sehingga mampu memberikan kenyamanan dan rasa aman dari bencana. Namun disatu sisi, membangun rumah ramah bencana harus bernilai esensial dan bukan hanya sekedar proyek pembangunan. Pembangunan tempat tinggal yang ramah bencana harus benar-

benar mengikuti standar mitigasi bencana sehingga membutuhkan pelaksanaan serius.

Aksi Daerah untuk Tujuan 12

Sayangnya dalam RAD provinsi NTB tidak menyebutkan aksi daerah untuk tujuan ke 12 (*responsible consumption and production*), sehingga artikel ini tidak dapat merefleksi aksi untuk tujuan 12. Selanjutnya artikel ini akan langsung merefleksi aksi pemerintah NTB untuk tujuan ke 13.

Aksi Daerah untuk Tujuan 13

Aksi yang dilakukan oleh pemerintah NTB untuk Tujuan ke 13 SDGs (merespon perubahan iklim dan dampaknya) sejalan dengan prinsip *human security* yaitu multisektoral dan berorientasi pada pencegahan (Laporan IKMI, 2015).

Aksi Daerah untuk Tujuan 14

Tujuan ke 14 adalah melestarikan dan menggunakan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Tentunya sumber daya laut sangat berhubungan dengan Indonesia terutama provinsi NTB yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Laut menjadi salah satu mata pencarian warga NTB mulai dari hasil alamnya dan juga pemanfaatan untuk pariwisata. Se jauh ini, menurut RAD, aksi yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah menghadirkan kebijakan untuk pelestarian dan pemanfaatan ekosistem laut (Rencana Aksi Daerah NTB, hal 120). Dari kebijakan

tersebut salah satu hal yang menjadi perhatian adalah melindungi para nelayan (Rencana Aksi Daerah NTB, hal 125). Kebijakan – kebijakan tersebut harus segera dilaksanakan agar dapat memanfaatkan laut menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Aksi – aksi tersebut juga dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *human security* yaitu mengenai spesifikasi konteks rasa aman. Selain itu melindungi ekosistem laut juga dapat memberikan rasa aman dari segi ekonomi mengingat wilayah NTB yang terdiri dari pulau-pulau.

Aksi daerah untuk Tujuan 15

Berbeda dengan tujuan 14, tujuan 15 SDGs lebih fokus pada pelestarian dan pemanfaatan ekosistem darat. Dua aksi yang dilakukan oleh pemerintah NTB sesuai dengan RAD adalah meningkatkan kinerja tata kelola hutan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan (Rencana Aksi Daerah NTB, hal 126 – 127). Aksi tersebut melibatkan masyarakat sehingga mewakili “prinsip yang berpusat pada manusia”. Di sisi lain melibatkan komunitas masyarakat dalam aksi tersebut juga dapat memberikan rasa aman terhadap kelompok-kelompok tertentu di NTB.

Aksi Daerah untuk Tujuan 16

Tujuan ke 16 SDGs adalah mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan

inklusif di semua tingkatan. Aksi yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah mengurangi segala bentuk kekerasan dan membangun kelembagaan yang tangguh. Kehadiran rasa damai sebenarnya sudah memberikan gambaran untuk memberikan rasa aman kepada manusia. Menghilangkan kekerasan merupakan bagian dari pemberian rasa aman kepada individu dan merupakan bagian hak paling dasar seorang manusia.

Aksi Daerah untuk Tujuan 17

Aksi pemerintah provinsi NTB untuk mencapai tujuan pembangunan terakhir adalah mobilisasi sumber daya domestik, kemitraan multipihak, pemanfaatan teknologi dan informasi, dan jaminan keamanan data (Rencana Aksi Daerah NTB, hal 131 – 142). Aksi – aksi tersebut tergolong hal yang baru sehingga untuk *human security* sendiri memerlukan pengembangan studi agar dapat menempatkan rasa aman terutama terhadap hal yang berhubungan dengan teknologi dan informasi.

KESIMPULAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global untuk mencapai tujuan berkelanjutan di seluruh dunia dengan memiliki prinsip inklusifitas. Tidak hanya negara, semua pihak dilibatkan dalam menyukseskan agenda ini. Setiap negara mencoba mengadopsi agenda SDGs yang kemudian di implementasikan dengan menyelaraskan dengan kondisi di negaranya masing – masing, termasuk di

Indonesia. Indonesia mencoba memanfaatkan agenda SDGs untuk dijadikan pedoman pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk BAPPENAS sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah daerah juga turut dilibatkan melalui Peraturan Presiden tahun 2017. Pemerintah NTB kemudian menyambut peraturan tersebut dengan menghadirkan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. RAD tersebut kemudian menjadi pedoman dan strategi dalam tataran implementasi.

Artikel ini telah merefleksikan setiap aksi yang dilakukan pemerintah NTB untuk melaksanakan 17 Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan menggunakan konsep *human security* (keamanan manusia). Aksi yang pertama masih belum dijelaskan secara khusus sehingga masih belum dapat direfleksikan dengan konsep *human security*. Untuk aksi kedua, dapat dikatakan sejalan dengan dengan *human security* terutama dalam segi ekonomi, makanan, dan kesehatan. Sedangkan untuk aksi ketiga yang dilakukan pemerintah NTB sejalan dengan prinsip *human security* yaitu *people-centered* sekaligus memberikan rasa aman untuk sektor kesehatan. Selanjutnya aksi keempat yang dilakukan pemerintah NTB merefleksikan bagian – bagian penting dalam *human security* seperti kemandirian ekonomi dan juga menampilkan prinsip inklusifitas sekaligus menargetkan untuk

menyelesaikan masalah struktural.

Untuk mencapai tujuan kelima, aksi yang dilakukan pemerintah NTB perlu dimaksimalkan lagi guna memenuhi syarat keamanan kesehatan, kemandirian komunitas, dan keamanan personal. Namun aksi tersebut belum melalui proses "bottom-up". Berikutnya dalam aksi untuk mencapai tujuan keenam pemerintah NTB melibatkan masyarakat secara langsung dimana hal ini sangat disarankan dalam prinsip dan konsep *human security*. Sayangnya untuk aksi berikutnya masih belum dapat direfleksikan. Aksi kedelapan masih dapat direfleksikan terutama terkait kemandirian ekonomi. Sedangkan untuk aksi kesembilan tidak secara eksplisit dapat direfleksikan dengan *human security* tetapi aksi tersebut dapat menjamin kebutuhan hidup masyarakat.

Aksi selanjutnya dapat dikatakan sangat sejalan terutama untuk keamanan kesehatan, ekonomi dan komunitas. Sayangnya aksi ke 11 untuk mencapai tujuan SDGs masih belum dijelaskan secara konkrit. Sedangkan untuk mencapai tujuan ke 13 aksi yang dilakukan mencerminkan prinsip multisektoral dan berorientasi pada pencegahan. Aksi berikutnya dapat dikatakan sangat baik karena ditujukan pada isu yang sangat spesifik. Selanjutnya aksi daerah untuk tujuan 15 cukup mewakili keamanan komunitas. Sedangkan untuk aksi berikutnya dapat dikatakan mencerminkan pemberian rasa aman kepada individu dan juga memenuhi kebutuhan dasar. Untuk aksi

yang terakhir masih terbilang isu yang baru dan belum dijelaskan secara komprehensif dalam konsep *human security*

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda NTB. (n.d.). *Generasi Emas NTB*. <https://bappeda.ntbprov.go.id/category/gen/>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (2021). *Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa di Provinsi NTB*. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-kekerasan-terhadap-perempuan-dewasa-di-provinsi-ntb>
- Diouf, G. (2019). Millenium Development Goals (Mdgs) and Sustainable Development Goals (Sdgs) in Social Welfare. *International Journal of Science and Society*, 1(4), 17 - 24. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v1i4.144>
- Dumpe, A.L., & Guevara, A.d.H. (2020). A Ranking For the Sustainable Development Goals Focusing on The 5PS. *RISUS - Journal on Innovation and Sustainability*, 11(3), 129-137.
- FA, J. Q. A. (2019). Gagasan Human Security Dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dan Perbandingannya Dengan Kebijakan Kekerasan Seksual Di Jepang. *RESPONSIVE: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang*

- Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 8-13.
<https://doi.org/10.24198/responsive.v2i1.23016>
- Filho, W. L. (2015). An Overview of Expected Progress and Outcomes from the UN Conference on Sustainable Development (Rio+): The Role of Universities. In: Leal Filho, W., Úbelis, A., Bērziņa, D. (eds). *Sustainable Development, Knowledge Society and Smart Future Manufacturing Technologies* (pp. 207–215). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-14883-0_14
- Hadiwinata, B.S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (25 Maret 2015). *Kementerian LHK Dan UN-SDSN Pererat Kerjasama Untuk Pembangunan Berkelanjutan*.
<http://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-tapak/2757/kementerian-lhk-dan-un-sdsn-pererat-kerjasama-untuk-pembangunan-berkelanjutan>
- Kementerian PPN. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) (Edisi II)*.
<https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>
- Laporan IKMI. (2015). *Pengembangan Konsep Indeks Keamanan Manusia Indonesia* 2015.
[http://ditpolkom.bappenas.go.id/bas edir/Kajian%20Ditpolkom/4\)%20Kajian%20Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/bas edir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%20Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf)
- Levy, J. S. (2009). Qualitative methods in international relations. In *Millennial Reflections on International Studies* (pp. 432-454). University of Michigan Press.
- Medcof, J. W., & Song, L. J. (2013). Exploration, exploitation and human resource management practices in cooperative and entrepreneurial HR configurations. *International Journal of Human Resource Management*, 24(15), 2911–2926.
<https://doi.org/10.1080/09585192.2012.756055>
- Panuluh, S., & Fitri, M.R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indoneisa. Briefing Paper 02*, 1–25.
https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf
- Pemerintah Provinsi NTB. (26 April 2021). *Edukasi Masyarakat Secara Masif, Berantas Penyebaran Virus HIV/AIDS di NTB*.
<https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/edukasi-masyarakat-secara-masif-berantas-penyebaran-virus-hiv-aids-di-ntb>
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
- Pergub NTB Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://jdih.ntbprov.go.id/content/pergub-nomor-54-tahun-2019>
- Queralt, A., & Sala, I. (2018). *Implementing the 2030 Agenda in Catalonia: Challenges and Opportunities* (pp. 63–65). Sustainable Development Goals: Actors and Implementation: A Report from the International Conference.
- Rencana Aksi Daerah NTB. (2019). *Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals 2019-2023 (RAD TPB/SDGs)*.
- SMERU Research Institute. (2017). Dari MDGs ke SDGs : Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret. *Buletin SMERU Research Institute*, 2, 1–20. www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/news201702.pdf
- Sofiani, T. (2009). Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 1(1), 63-72
- Stevens, C., & Kanie, N. (2016). The transformative potential of the Sustainable Development Goals (SDGs). *Int Environ Agreements* 16, 393–396.
- <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9324-y>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, L. (24 Desember 2019). *Mengejar Angka Kemiskinan NTB 1 Digit*. Bappeda NTB. <https://bappeda.ntbprov.go.id/mengejar-angka-kemiskinan-ntb-1-digit/>
- United Nations. (2009). *Human Security in Theory and Practice, Application of the Human Security Concept and the United Nations trust Fund fo Human Security*. <https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf>
- United Nations. (n.d). *Do you know all 17 SDGs?*. <https://sdgs.un.org/goals>
- UNCDP. (2018). *Leaving No One Behind*. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2754713_July_PM_2_Leaving_no_one_behind_Summary_from_UN_Committee_for_Development_Policy.pdf
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*. <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication>
- Wijana, I. N., & Suhardi, M. (2018). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Administration and Educational*

Management (ALIGNMENT), 1(1), 11–23. DOI: <https://doi.org/10.31539/alignment.v1i1.210>
Yusuf, A.A., Alisjahbana, A.S., Kadarisman, A., Hadisoemarto, P.F., Anna, Z., Hidayat, A.M.R., Ghina, A.A., Megananda, Maulana, N., Rahma., & Larasati, W. (2017).

Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia. Unpad Press.
Zu, L. (2022). Ensuring No One Is Left Behind: The Case of Youth. In: *Responsible and Sustainable Business* (pp. 277–300). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91117-1_18

TENTANG PENULIS

Khairur Rizki adalah tenaga pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Menjadi pengajar telah digeluti sejak tahun 2018. Ia merupakan lulusan President University tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Alumni Hubungan Internasional ini memiliki fokus kajian pada isu Kemanusiaan, HAM, Migrasi Internasional, dan Studi Perdamaian.

Muhammad Sood merupakan pendiri Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Mataram. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional. Muhammad Sood baru saja mendapatkan gelar Profesor dengan latar belakang pada ilmu Hukum, dan aktif menulis dalam kajian Hukum Internasional.

Valencia Husni merupakan lulusan strata satu dari Universitas Parahayangn. Ia mengambil jurusan Administrasi Publik. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan strata dua di Universitas Indonesia pada jurusan Hubungan Internasional. Saat ini Valencia juga aktif sebagai dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram.

CARA SITASI ARTIKEL INI:

Rizki, K., Sood, M., & Husni, V. (2022). *Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.* *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 59-80. DOI: 10.31957/pjdir.v2i1.1944